

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Hingga saat ini, belum ada definisi-definisi yang baku dan dapat diterima secara umum mengenai kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan pemecahannya pun tidak mudah. Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek.

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Disamping itu pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.¹

¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 78.

Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat, orang miskin umumnya tidak membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit dan merupakan ketidakberdayaan, teringgirkan dan tidak memiliki rasa bebas.²

Sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Banten memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.³

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian SMERU menjelaskan beberapa definisi kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:⁴

- a. Kemiskinan pada umumnya di definisikan dari segi endekatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima seseorang. Secara luas kemiskinan

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 299.

³<https://banten.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1> diakses pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2017 pukul 21:56 WIB

⁴ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 122-123.

meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- b. Kadang- kadang, kemiskinan di definisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset, seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.
- c. Kemiskinan nonmaterial meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Bank Dunia mendefinisikan *Kemiskinan absolut* sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan *Kemiskinan menengah* untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dengan batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari.⁵

2. Ukuran Kemiskinan

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.⁶

a. Kemiskinan Absolut

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-1 diakses pada hari Rabu, 2 Agustus 2017 pukul 12.27 WIB.

⁶ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Gunadarma), 156-157.

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh Karena itu, *Kincaid* melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator utama kemiskinan adalah sebagai berikut:⁷

a. Pendapatan/Konsumsi per Minggu/Bulan/Tahun

Yang paling umum digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu miskin atau tidak adalah jumlah pendapatan dari hasil kerja/usaha rata-rata per minggu, atau bulan atau per tahun. Namun, tidak gampang mendapatkan informasi mengenai pendapatan seseorang. Maka sebagai alternatifnya adalah nilai konsumsi rata-rata per minggu, bulan atau tahun.

Tentu hanya memakai data pendapatan dari hasil kerja atau usaha sebagai alat ukur tidak selalu menggambarkan fakta yang sebenarnya. Seseorang bisa mempunyai gaji yang rendah, namun punya banyak aset atau dapat warisan dari orang tuanya sehingga ia tergolong kaya, atau seseorang lain bisa mengeluarkan konsumsi sangat sedikit, namun tabungannya sangat banyak.

b. Aset

Jumlah nilai aset, seperti tanah, rumah/gedung, dan aset-aset lainnya yang bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Banyak orang di pedesaan atau bahkan di

⁷ Tulus T.H.Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2015), 110-117.

kota-kota besar di Indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal dirumah kontrakan yang sangat kecil. Namun kampung asal mereka punya tanah tetapi tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan capital. Hal ini biasanya karena tanah tersebut belum memiliki surat-surat resmi, seperti sertifikat tanah karena tanah itu adalah warisan turun temurun. Jadi, orang-orang ini kelihatannya miskin, namun sebenarnya mereka sangat kaya apabila tanah-tanah mereka yang menganggur tersebut bisa di transformasikan menjadi capital.

c. Total Kekayaan

Jumlah kekayaan seseorang atau sebuah keluarga atau rumah tangga adalah per definisi jumlah dari semua aset yang dimiliki orang itu ditambah dengan jumlah pendapatan yang didapatnya dari segala sumber, termasuk sebagai pekerja atau pegawai. Jumlah kekayaan jauh lebih baik daripada pendapatan sebagai sebuah indikator kemiskinan, karena seperti telah dibahas sebelumnya, seseorang bisa tidak mempunyai pekerjaan, namun ia tidak miskin karena memiliki aset atau banyak saham di sejumlah perusahaan atau mendapat warisan.

d. Makanan yang Dikonsumsi

Menyoroti makanan sebagai salah satu indikator kemiskinan harus terutama melihat pada dua hal, yakni porsi dan kualitas dari makanan yang dikonsumsi. Untuk porsi makanan, orang miskin lebih banyak memakai pendapatannya untuk konsumsi makanan daripada untuk non-makanan. Sedangkan untuk kualitas makanan, semakin miskin seseorang untuk setiap jumlah konsumsi makanan, semakin rendah tingkat rata-rata konsumsi protein (seperti garam) dan kalori. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kecukupan makanan tidak hanya dalam volume, tetapi juga kandungan/asupan energi, seperti kalori dan protein adalah gizi, terutama gizi anak-anak.

e. Tempat Tinggal

Tempat tinggal bisa dalam arti rumah dan lokasi rumah itu berada. Yang harus difokuskan adalah bentuk dan kualitas. Dalam hal rumah, bentuk dan kualitasnya bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada umumnya bentuk dari rumah yang dimiliki orang miskin lebih kecil dan sederhana dibandingkan rumah punya orang kaya. Sedangkan yang terkait dengan kualitas adalah menyangkut kualitas dari bahan-bahan bangunan yang digunakan dan kualitas dari rumah itu sendiri

dilihat dari sisi kenyamanan, keselamatan dan kesehatan. Dalam hal lokasi, orang miskin pada umumnya membangun rumah mereka di lokasi-lokasi yang sangat terpolusi, sangat padat manusia, dan sangat beresiko bencana, baik alam maupun karena ulah manusia, misalnya gubuk-gubuk di pinggir sungai atau jalur kereta api.

f. Pendidikan Formal

Yang dilihat tidak hanya tingkatnya, tetapi juga kualitasnya. Yang bisa digunakan sebagai indikator-indikator kemiskinan dari aspek pendidikan adalah misalnya, angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi sekolah, jumlah anak yang terdaftar di sekolah, atau/dan indeks pembangunan manusia (IPM).

g. Infrastruktur Dasar Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan infrastruktur dasar rumah tangga (RT) adalah seperti air bersih, sanitasi layak, listrik yang cukup, telekomunikasi, dan transformasi yang baik. Jadi yang bisa digunakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang mencerminkan kondisi infrastruktur dasar RT adalah, antara lain persentase dari jumlah RT di suatu wilayah (misalnya DKI

Jakarta) yang punya akses ke air bersih, jumlah RT yang memiliki sanitasi layak, sebagai persentase dari jumlah RT, porsi dari jumlah RT yang punya cukup listrik, persentase dari jumlah RT yang punya akses ke telekomunikasi dan jumlah RT sebagai persentase dari jumlah RT yang punya akses ke transportasi yang baik.

h. Kesehatan

Ada dua komponen penting dari aspek kesehatan yang harus diukur. Komponen pertama adalah akses ke pelayanan kesehatan yang layak/baik. Jadi, indikatornya misalnya adalah persentase dari jumlah populasi yang punya akses ke pelayanan kesehatan yang baik. Komponen kedua adalah kondisi kesehatan rata-rata masyarakat. Indikator-indikatornya antara lain adalah persentase dari jumlah masyarakat yang bergizi baik (sebagai contoh jumlah anak yang mengalami malnutrisi, tingkat kematian anak (1-5 tahun) per 1000 anak, tingkat kematian bayi per 1000 bayi yang lahir, jumlah kasus aids, malaria, kolera, TBC, dan jumlah kematian ibu pada saat melahirkan.

4. Pendekatan Kemiskinan

Para teoritis kemiskinan, mengelompokkan pendekatan kemiskinan menjadi tiga macam pendekatan yaitu:⁸

1. Pendekatan Kultural. Pendekatan ini dikemukakan oleh antropolog Oscar Lewis, bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang disebabkan oleh penderitaan ekonomi yang lama. Hal ini dapat terjadi akibat penjajahan (imperialis dan kolonialis) yang lama atau akibat pemerintahan yang korup dan otoriter (zaman Orba), sehingga menjadikan masyarakat dengan ciri-ciri budaya (ekonomi, sosial dan politik) seperti berikut:
 - a. Sistem ekonomi yang berkembang hanya berorientasi kepada keuntungan belaka, artinya tidak ada pandangan sistem ekonomi yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan sosial, dimensi sosial atau kemanusiaan tergilas ideologi keuntungan.
 - b. Angka pengangguran tinggi, banyak penganggur yang tidak memiliki keahlian (*unskilled*). Sehingga walaupun diberdayakan dengan peluang kerja, sulit terangkat karena tidak memiliki keahlian.

⁸ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, 232-233.

- c. Upah yang berlaku dalam sistem kepegawaian sangat rendah, Karena industri atau perusahaannya tidak efisien.
- d. Masyarakat miskin tidak memiliki kekuatan dalam organisasi politik, ekonomi dan sosial karena dominasi kaum kapitalis yang mengkooptasi penguasa, bahkan berkolaborasi menjadikan hegemoni baru dalam masyarakat, seperti kebijakan masyarakat mengambang (*floating mass*).
- e. Terbentuknya kelas masyarakat yang dominan, yang mendominasi segala sumberdaya (sosial, politik, budaya dan ekonomi) yang membentuk hegemoni kekuasaan, mendominasi segala kebijakan dan mengatasnamakan kebijakan publik.

Solusi bagi kemiskinan pendekatan kultural adalah perlu membangun organisasi untuk menyatukan orang miskin baik dalam bentuk gerakan *religious* atau warna ideologi gerakan apa saja (sesuai keadaannya atau “sui generis”) yang memberikan harapan serta pengikat solidaritas, perasaan identitas yang sama dengan masyarakat luas yang dapat menghancurkan sifat utama ciri budaya miskin. Dengan kata lain perlu dikembangkan gerakan kemampuan berprestasi untuk mengubah budaya miskin.

2. Pendekatan Struktural (Struktur Sosial) yang dinyatakan oleh Charles Valentine, bahwa kemiskinan sebagai situasi struktur sosial yang menekan sehingga kehilangan peluang kegiatan ekonominya. Valentine beranggapan bahwa kemiskinan timbul sebagai akibat situasi (struktur sosial) yang mana ada suatu kelompok sosial masyarakat tertentu (dengan status dan peranan “poleksosbudnya” menekan sebagian (besar) dari kelompok masyarakat, sehingga kehilangan peluang kegiatan ekonominya.
3. Pendekatan interaksional-kultur dengan struktur sosial (sistem sosial) yang dinyatakan oleh Herbert J. Gans yang disitir Ancok dalam Dewanta, bahwa kemiskinan timbul sebagai akibat hasil interaksi antara faktor kebudayaan yang sudah tertanam dalam diri orang miskin dengan faktor situasi yang menekan. Adanya masyarakat miskin sebagai warisan dari generasi sebelumnya, sedangkan yang lainnya miskin itu berlangsung secara periodik. Sebagian orang ada yang bertambah miskin (*down-wardly mobile*) dan sebagian lagi ada yang bertambah baik kehidupannya (*upward-mobile*). Solusi untuk kemiskinan model demikian adalah perlu mengetahui faktor-faktor yang menghambat orang miskin untuk menggunakan kesempatannya yang ada, disertai usaha memberikan keyakinan diri pada si

miskin untuk menggunakan kesempatan yang tersedia walaupun harus bertentangan dengan nilai budaya yang dianutnya. Untuk menyediakan kesempatan maka perlu dipahami sistem ekonomi, struktur kekuasaan, norma-norma serta aspirasi kelompok kaya yang diduga dapat menimbulkan adanya orang miskin.

5. Penyebab Kemiskinan

Tercatat ada tiga macam pendekatan yang mencoba menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yakni:⁹

1. Sistem *Approach*

Pendekatan ini lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi dan demografi. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman. Pendekatan ini menyarankan dilakukannya intervensi tertentu untuk meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan alam melalui introduksi teknologi baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas lebih besar dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi, sehingga dapat

⁹ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2010), 234-235.

tercapai *surplus* produksi serta dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi.

2. *Decision-making model*

Pendekatan ini menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Pendekatan ini menghendaki ditingkatkannya kemampuan, yakni keahlian dan keterampilan SDM (Sumber Daya Manusia) seperti pembentukan dan pengembangan motivasi, mendorong mobilitas atau urbanisasi, peningkatan pendidikan pada orang-orang miskin supaya mereka memiliki jiwa-jiwa yang inovatif, kreatif, responsif, dan proaktif dalam persaingan.

3. *Structural Approach*

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi dan bentuk kapital lainnya. Disini wajah kemiskinan memiliki dimensi struktural, yang merupakan akibat dari adanya ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan aset-aset ekonomi atau kapital lainnya yang ditunjukkan dengan adanya sebagian anggota

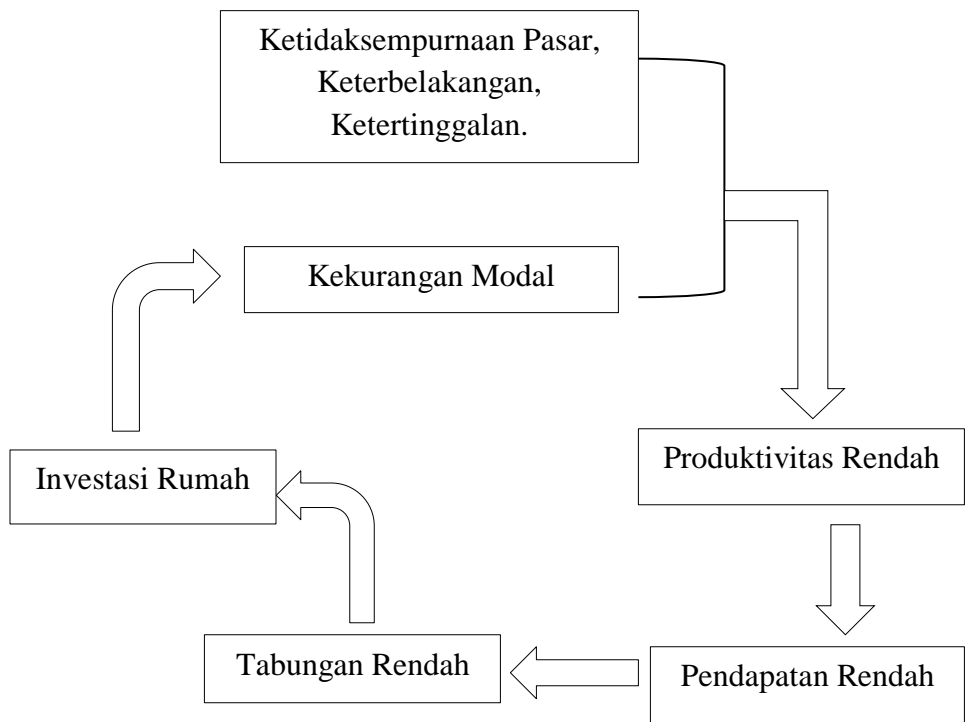
masyarakat yang jumlahnya lebih kecil tetapi menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi yang lebih banyak. Sementara sebagian anggota masyarakat yang jumlahnya lebih kecil tetapi menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi yang lebih sedikit. Pendekatan ini menyarankan untuk menetapkan kebijaksanaan politik pembangunan yang langsung mengidentifikasi dan menghapus sumber-sumber ketimpangan itu sendiri, yakni bagaimana agar banyak orang bisa memiliki kesempatan dan peluang ekonomi dan partisipasi politi yang sama.

Shrap, et.al dalam Kuncoro (2003:131) mengidentifikasikan ada tiga penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi, yaitu:¹⁰

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang,
 - b. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia, dan
 - c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
- Ketika penyebab kemiskinan kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of proverty*). Adanya

¹⁰ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 78-79.

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi mengakibatkan pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953 yang mengatakan bahwa *a poor country is poor because it is poor* (negara miskin itu miskin karena miskin).



Gambar Lingkaran Setan Kemiskinan

6. Ciri-ciri Masyarakat Miskin¹¹

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara merekapun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak

¹¹ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2013), 5-6.

dapat menyelesaikan sekolah oleh karena harus membantu orang tua mencari nafkah tambahan.

4. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Di dorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan. Sedangkan di kota sendiri terutama di negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa tersebut. Apabila di negara maju pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang

tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, perkembangan justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

7. Strategi/ Kebijakan Pengentasan Kemiskinan¹²

Komite dari PBB perencanaan pembangunan menyiapkan suatu deklarasi untuk Dekade Pembangunan Kedua dari PBB yang mendeklarasikan bahwa penurunan kemiskinan lewat percepatan proses pembangunan, penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan sosial lainnya (termasuk kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan) sebagai tujuan terpenting dari suatu strategi pembangunan internasional yang tepat.

Pada tahun 2000, Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang dibangun di atas tiga pilar, yakni: pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dari penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka., dengan

¹² Tulus T.H Tambunna, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 214-217.

memperkuat partisipasi mereka di dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Keamanan adalah proteksi bagi orang miskin terhadap guncangan-guncangan yang merugikan, lewat manajemen yang lebih baik dalam menangani guncangan-guncangan ekonomi makro dan juga jaringan-jaringan pengamanan yang lebih komprehensif, sedangkan kesempatan adalah proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap dua aset penting, yakni modal fisik dan modal manusia (SDM) dan peningkatan tingkat dari pengembalian dari aset-aset tersebut.

Sedangkan strategi pengentasan kemiskinan dari *Asean Development Bank*, ada tiga pilar dari suatu strategi penurunan kemiskinan, yakni:

- (i) Pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan;
- (ii) Pengembangan sosial yang terdiri dari pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status dari perempuan, dan perlindungan sosial; dan
- (iii) Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang di butuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilar pertama.

Tabel

Model dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan¹³

Aspek-Aspek	Masalah	Program
Kemiskinan	Tidak memiliki aset produksi dan berpenghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	a. Program padat b. Bantuan peralatan usaha
Kerentanan	Tidak memiliki tabungan, mudah terperangkap hutang	a. Bantuan tabungan b. Revitalisasi Takesra- Kukesra
ketidakberdayaan	Mudah dipermainkan tengkulak atau pengijon, lemah posisi tawarnya dalam penentuan harga jual produk yang dihasilkan, kemampuan melakukan diversifikasi usaha lemah.	a. Pelatihan keterampilan alternatif b. Pengembangan badan penyangga c. Perlindungan bagi masyarakat miskin
Keterisolasian	Tidak memiliki akses terhadap jaringan kerja dan modal usaha	a. Memfasilitasi hubungan kerja antara distributor dan usaha si

¹³ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, 245.

		<p>miskin (memasok barang dagangan bagi simiskin)</p> <p>b. Bantuan modal usaha</p>
Kelamahan jasmani	<p>Sering sakit, dan implikasi sakit bagi keluarga miskin bukan sekedar harus mengeluarkan biayaa berobat, tapi juga menanggung resiko hilangnya penghasilan karena tidak bekerja akibat sakit</p>	<p>a. Asuransi kesehatan</p> <p>b. Bantuan dana bagi keluarga miskin paceklik (<i>cost of Living</i>)</p>

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.¹⁴

PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu.¹⁵

2. Konsep Perhitungan

PDRB di hitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.¹⁶

¹⁴ *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Banten vol.14, no.8, 2014, 1v.*

¹⁵ *Produk Domestik Regional Bruto Kota Cilegon 2006 (Badan Perencana Daerah (BAPEDA) Kota Cilegon, 5.*

¹⁶ *Tri Widodo, Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah), (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006), 78.*

3. Metode Perhitungan

a) Metode Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Untuk menghitung PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.¹⁷

a. Metode Langsung

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sector atau subsector tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan

¹⁷ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 24.

untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha (sektor) yaitu :¹⁸

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
- Pertambangan dan Penggalian,
- Industri Pengolahan,
- Listrik, Gas dan Air Bersih,
- Konstruksi,
- Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- Pengangkutan dan Komunikasi,
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan,
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Sementara itu, PDRB berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu: ¹⁹

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa

¹⁸<https://banten.bps.go.id/Subjek/view/id/52#accordion-daftar-subjek1|subjekViewTab2> diakses pada hari Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 18.06 WIB.

¹⁹<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>. Di akses pada hari Selasa, 25 juli 2017 pukul 15.10 WIB.

dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.
4. Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
5. Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (FOB).
6. Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight* (CIF).

b) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

c) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang di produksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk:

- Konsumsi rumah tangga,
- Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- Konsumsi pemerintah,
- Pembentukan modal tetap bruto (investasi),
- Perubahan stok, dan
- Ekspor neto.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang dapat digunakan yaitu:

1. Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan,
2. Jumlah produksi fisik,
3. Tenaga kerja,
4. Penduduk, dan
5. Alokator tidak langsung lainnya.

b) Metode Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2000, yaitu: ²⁰

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai output (produksi) dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2000. Hasilnya merupakan output

²⁰ Produk Domestik Regional Bruto Kota Cilegon 2006 (Badan Perencana Daerah (BAPEDA) Kota Cilegon, 10-13.

dan biaya antara atas harga konstan 2000. Selanjutnya NTB atas dasar harga konstan, diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara. Dalam praktek, sangat sulit melakukan melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang sangat banyak, karena mencakup komponen input yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolasi dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi misalnya tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan.

Kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

c. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga yang berlaku masing-masing tahun indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan sebagainya. Indeks harga diatas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

d. Deflasi Berganda

Yang dideflasi adalah ouput dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan

cakupan komoditinya. Sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara. Disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam perhitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai. Perhitungan komponen penggunaan PDRB atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat data yang tersedia maka digunakan cara deflasi dan ekstrapolasi.

C. Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*).²¹

²¹ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 65.

Pengangguran tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum menemukan pekerjaan. Jadi, pengangguran merupakan orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.²²

2. Macam-macam Pengangguran

Edwards membedakan 5 (lima) bentuk pengangguran, yaitu:²³

- a. Pengangguran terbuka; baik sukarela (tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun karena terpaksa (mau bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan).
- b. Setengah menganggur (*under employment*); yaitu mereka yang bekerja lamanya kurang dari yang mereka kerjakan (hari, minggu, atau musiman).
- c. Tampak bekerja tetapi tidak bekerja penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, antara lain:
 - Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), misalnya seseorang bekerja sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.

²² Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Revisi*, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SMH Banten, 2013), 107-108.

²³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 107-108.

- Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*), yaitu orang bekerja tidak sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikannya.
 - Pensiun lebih awal, yaitu mereka yang pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun. Di beberapa negara, usia pensiun dimudakan, hal ini digunakan untuk menciptakan peluang bagi yang muda-muda untuk menduduki jabatan di atasnya.
- d. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), yaitu mereka yang bekerja *full time*, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- e. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif, tetapi karena kurang sumber daya penolong yang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

3. Penyebab Pengangguran

Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran:²⁴

²⁴ Riska Franita, *Analisa Pengangguran di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1 Desember 2016), 89.

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memilli kekurangan tenaga pekerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimal nya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill.
6. Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Indonesia sedang mengalami perubahan perekonomian, dimana Indonesia sedang melakukan perubahan perekonomian dari sector pertanian ke sektor industri. Dengan meningkatnya perekonomian kearah industri diharapkan perekonomian Indonesia jauh lebih baik.

4. Dampak Pengangguran

Dalam banyaknya tingkat pengangguran sangat berdampak ke berbagai sektor. Dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian Negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran adalah:²⁵

1. Ditinjau dari segi Ekonomi Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.
2. Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak

²⁵ Riska Franita, *Analisa Pengangguran di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1 Desember 2016), 90.

kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain – lain untuk memenuhi kehidupan mereka.

3. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri , keputus-asaan, dan akan menimbulkan depresi.
4. Ditinjau dari segi politik maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
5. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan.
6. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya.
7. Banyaknya dampak pengangguran yang timbul, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap

daerah harus mampu mandiri dalam meningkat laju perekonomiannya.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah, Perbedaan, dan Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Dio Syahrullah, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jakarta “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012” Tahun Penelitian 2014.	Rumusan masalah: 1. Seberapa besar PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten? 2. Seberapa besar pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten? 3. Seberapa besar tingkat pengangguran terbuka berpengaruh	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kemiskinan di Provinsi Banten mampu dijelaskan oleh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran sebesar 53,61% (R^2). Selanjutnya secara parsial koefisien regresi menunjukkan (1) PDRB berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% dengan nilai probabilitas 0,0102 dan

		<p>terhadap kemiskinan di Provinsi Banten?</p> <p>4. Seberapa besar PDRB, pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kemiskinan di Provinsi Banten?</p> <p>Perbedaannya: penelitian terdahulu terdapat 3 variabel independent yaitu PDRB, pendidikan, dan pengangguran, sedangkan penelitian saat ini hanya ada 2 variabel</p>	<p>berhubungan negatif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar - 0,552266,</p> <p>(2) Variabel pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten ditandai dengan nilai probabilitas 0,9924,</p> <p>(3) Pengangguran berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% dengan nilai probabilitas 0,0006 dan berhubungan positif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar</p>
--	--	--	--

		<p>independent yaitu PDRB dan pengangguran serta tahun penelitiannya berbeda dimana penelitian terdahulu meneliti dari tahun 2009-2012, sedangkan penelitian saat ini meneliti dari tahun 2010-2015.</p> <p>Persamaannya: Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang PDRB, pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>2,947913. Lalu kemiskinan di Provinsi Banten dipengaruhi signifikan oleh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran secara simultan sebesar 10,78% (F-Statistik).²⁶</p>
2.	I Made Parwata, I Wayan Swendra, Fridayana	<p>Rumusan masalah: 1. Adakah pengaruh Produk</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan: (1) Diperoleh $R_{yx1x2} = 0,804$, dengan nilai p-</p>

²⁶ Dio Syahrullah, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jakarta berjudul "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012"*, 2014.

	<p>Yudiaatmaja, yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan”, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)</p>	<p>Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan?</p> <p>2. Adakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan?</p> <p>3. Adakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan?</p> <p>4. Adakah pengaruh Produk Domestik</p>	<p>value $0,000 < \alpha$ $0,05$. artinya ada pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Besar koefisien determinasi (R^2_{yx1x2}) adalah $0,646$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar $64,6\%$ tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama (simultan) sedangkan sisanya sebesar $0,354$ atau $35,4\%$</p>
--	---	--	---

		<p>Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng periode tahun 2009-2013?</p> <p>Perbedaannya: terletak pada tempat penelitian dan tahun penelitian. Dimana penelitian terdahulu meneliti di Kabupaten Buleleng periode tahun 2009-2013 sedangkan penelitian saat ini meneliti di Provinsi Banten periode tahun 2015.</p> <p>Persamaannya: Peneliti terdahulu dengan peneliti</p>	<p>dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. (2) Diperoleh hasil $Pyx1 = -0,688$ dengan nilai p-value $0,000 < \alpha 0,05$, maka menolak H_0. Hasil ini berarti ada pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Besarnya pengaruh total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 0,523 atau 52,3%. (3) Diperoleh hasil $Pyx2 = 0,272$ dengan nilai p-value $0,002 < \alpha 0,05$,</p>
--	--	---	--

		<p>saat ini sama-sama meneliti tentang PDRB, pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>maka menolak H_0. Hasil ini berarti ada pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Besarnya pengaruh total tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 0,074 atau 7,4%. (4) Diperoleh hasil $F_{2 \times 1} = 0,265$ dengan nilai p-value $0,000 < \alpha 0,05$, maka menolak H_0. Hasil ini berarti ada pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng. Besarnya</p>
--	--	---	--

			<p>pengaruh total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 0,070 atau 7,0%.²⁷</p>
3.	<p>Yarlina Yacoub, yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, e-Journal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas</p>	<p>Rumusan masalah:</p> <p>1. Adakah pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Provinsi Kalimantan Barat?</p> <p>Perbedaannya: terletak pada tempat penelitian. Dimana penelitian terdahulu meneliti di Kabupaten/Kota</p>	<p>Hasil uji dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ adalah: (1) Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan tingkat, dengan nilai $t_{0,002} < 0,05$ membentuk sebuah hubungan yang berlawanan (negatif), yang dalam teori seharusnya menjadi arah (positif). (2)</p>

²⁷ I Made Parwata, dkk, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan”*, (Volume 4 Tahun 2016).

	<p>Tanjungpura Pontianak (Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012)</p>	<p>di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan penelitian saat ini meneliti di Provinsi Banten</p> <p>Persamaannya: Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>Penganggur yang ada di rumahtangga tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Ini terutama terjadi pada pengangguran terdidik dan total pengangguran terbuka yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebanyak 47,86% adalah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA ke atas (pengangguran terdidik). Disisi lain, kenyataan besarnya</p>
--	--	--	---

			<p>tingkat pengangguran tersembunyi (bekerja dengan jam kerja yang rendah atau dengan pendidikan yang rendah). Walaupun mereka bekerja (tidak menganggur), namun pendapatan yang diterima relatif rendah dan dibawah garis kemiskinan (angka pengangguran tersembunyi yaitu sekitar 43,51% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja). (3) Pada kelompok keluarga yang sangat miskin, justru tingkat pengangguran rendah karena sebagian besar anggota keluarga bekerja untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak-anak</p>
--	--	--	--

			<p>juga dilibatkan dalam bekerja dengan alasan penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terutama pada keluarga petani dengan pendidikan yang rendah (dari total angkatan kerja yang bekerja, 61,07 % nya berpendidikan SD ke bawah, sehingga pendapatan yang diterima rendah). Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB (25,00%) tetapi sektor ini juga yang menyerap tenaga kerja paling besar (60,43%) sehingga menghasilkan</p>
--	--	--	--

			<p>produktivitas paling rendah (Rp 5.828,08) dibandingkan sektor lainnya. Dengan produktivitas yang sangat rendah, tidak mengherankan bahwa petani di Kalimantan Barat secara rata-rata miskin, walaupun dalam kategori tidak menganggur.²⁸</p>
--	--	--	--

E. Hubungan Antara Variabel

Pada umumnya sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) berada diantara masyarakat miskin, sedangkan yang bekerja dengan upah/gaji tepat di sektor pemerintah maupun swasta termasuk dalam kelompok kelas menengah keatas. Namun, salah bila beranggapan bahwa setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja penuh adalah orang kaya. Karena ada juga pekerja di

²⁸ Yarlina Yacoub, e-Journal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, (Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012).

perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela, karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan leboh rendah dan mereka bersikap demikian karena ada sumber lain yang membantu masalah keuangan mereka (misalnya family, teman, tempat meminjam uang). Orang seperti ini bisa disebut menganggur, tetapi belum tentu miskin. Tetapi banyak juga individu yang bekerja secara penuh per hari tetapi tetap memperoleh pendapatan sedikit.

Dengan demikian untuk mengurangi kemiskinan dan distribus pendapatan di negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan bekerja merupakan unsur paling penting dalam strategi pembangunan yang menitikberatkan penghapusan kemiskinan.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu argumen yang akan diuji kebenarannya dimana setiap penelitian harus menuliskan hipotesisnya. Jika didasarkan pada perumusan masalah diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0:\beta_1 = 0$ Diduga tidak terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.
 $H_1:\beta_1 \neq 0$ Diduga terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.
2. $H_0:\beta_2 = 0$ Diduga tidak terdapat pengaruh antara Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.
 $H_1:\beta_2 \neq 0$ Diduga terdapat pengaruh antara Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.
3. $H_0:\beta_3 = 0$ Diduga tidak terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.
 $H_1:\beta_3 \neq 0$ Diduga terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.